

Politik dan Uang

Politik biasanya bergandengan tangan dengan ideologi. Sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan hidup, pemikiran, cita-cita, dan sejenisnya bergabung dalam sebuah partai politik. Partai itu digerakkan oleh ideologinya itu. Uang memang diperlukan bagi partai politik untuk memperjuangkan ideologinya itu, dan akan dihimpun dari seluruh pendukung dan simpatisannya.

Partai politik yang digerakkan oleh ideologi, maka di dalamnya terjadi suasana perjuangan dan pengorbanan yang tinggi. Namun sebaliknya, jika ideologi itu sudah meredup, maka kekuatan itu akan digantikan oleh uang. Orang mau bergerak tatkala ada uang. Tanpa uang maka apa saja tidak berjalan. Sementara itu, uang tidak bisa dikumpulkan oleh partai politik yang tidak menyandang ideologi yang jelas dan kokoh.

Dulu tatkala partai politik masih digerakkan oleh ideologi, maka semangat berkorban itu terasa sekali. Banyak orang mau mengeluarkan uangnya untuk mendukung partainya. Gerakan itu tidak terkecuali dilakukan oleh rakyat biasa yang terbatas ekonominya. Mereka menghidupi partai politiknya secara patungan. Para anggota partai dan simpatisannya bersedia memberikan sebagian uangnya untuk memenangkan partai.

Namun gambarannya sangat berbeda tatkala ideologi itu sudah meredup dan kekuatan partai politik beralih pada uang. Siapapun yang memiliki uang, maka mereka itulah yang akan menduduki posisi-posisi penting dalam partai politik. Akibatnya uang tidak mengalir dari bawah ke atas, melainkan berbalik, yaitu dari atas ke bawah. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan mungkin seseorang yang tidak memiliki uang akan berhasil menduduki posisi-posisi strategis dalam partai politik, termasuk dalam pemerintahan.

Dalam budaya politik seperti itu, maka tidak saja barang atau jasa yang bisa dibeli, tetapi adalah kekuasaan dan bahkan lebih sederhana lagi adalah suara. Maka yang terjadi dalam partai politik adalah suasana transaksi-transaksi jual beli suara. Buahnya adalah terjadi kasus-kasus korupsi di mana-mana, baik di pusat hingga di daerah-daerah.

Melihat kenyataan seperti itu, maka bisa dipahami bahwa sebenarnya korupsi adalah anak kandung dari politik yang tidak memiliki kekuatan ideologi yang jelas. Sekalipun memang, partai politik yang berideologis jelas pun juga masih terdapat kasus-kasus korupsi. Namun biasanya, korupsi tidak sebanyak tatkala ideologi itu melemah. Oleh karena itu, ketika korupsi mulai menggejala, yaitu sejak di zaman orde baru, maka kejadian itu adalah wajar, karena sejak itu ideologi diperlemah. Dan keadaan itu berlanjut, dan bahkan hingga sekarang ini.

Dalam suasana seperti itu, apapun instrumen yang digunakan untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil secara tuntas. Buktinya tidak sulit dicari. Sekalipun ada gerakan upaya pemberantasan korupsi besar-besaran, makasesuatu yang dibenci itu tetap saja berjalan. Bahkan petugas pemberantas korupsi pun, -----bisa jadi, suatu saat juga melakukan korupsi. Hal itu terjadi oleh karena korupsi adalah sebuah konsekuensi dari sistem sosial yang ada.

Sebuah metafora sederhana, kiranya perlu dikemukakan, yaitu bahwa adalah aneh jika kita tidak mengendaki terdapat bau kotoran, tatkala di rumah itu dipelihara ayam. Maka untuk menghindarinya, cara yang tepat adalah tidak memelihara ayam atau binatang lapapun. Akan menjadi aneh, tidak menyukai kotoran tetapi memelihara binatang. Atau tidak menyukai korupsi tetapi membiarkan sistem yang memproduksi para koruptor.

Oleh sebab itu, untuk memberantas korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara memperkokoh posisi polisi, kejaksaan, mahkamah agung, dan bahkan membentuk KPK sekalipun. Gejala korupsi bisa dikurangi manakala perpolitikan di negeri ini juga diubah. Partai politik harus memiliki dan mengembangkan idiologi secara jelas, yang bisa menggerakkan banyak orang. Terserah saja idiologi apa yang akan diperjuangkan itu. Akan tetapi, -----yang jelas, jika orientasi partai politik masih tetap sangat pragmatis, maka juga beresiko rentan munculnya korupsi itu.

Idiologi, cita-cita, atau pandangan hidup di manapun, akan selalu diperjuangkan oleh para pendukungnya. Tentu cita-cita itu adalah mulia, apalagi dimiliki oleh sekelompok orang dalam jumlah besar. Beridiologi sama halnya orang memiliki cita-cita atau pandangan hidup yang jelas, dan begitu pula sebaliknya. Di dunia ini hanya orang-orang yang memiliki cita-cita saja yang akan meraih kemuliaan dan tahta yang terhormat. Oleh karena itu, bangsa ini senantiasa perlu membangun cita-cita, idiologi, pandangan hidup bersama.

Sebagai bangsa besar, cita-cita hidup itu boleh-boleh saja berbeda, dan bahkan akan selalu berbeda. Tokh bagaimanapun perbedaan itu masih tetap bisa dipersatukan oleh pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Sebaliknya, bangsa ini akan menjadi rendah, jika orientasinya hanya sekedar untuk mencari uang atau bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekalipun hal itu juga perlu. Dengan memperjuangkan cita-cita besar dan mulia biasanya akan menjadikan hal-hal yang bersifat praktis dan pragmatis, ----- seperti uang misalnya, akan tercukupi dengan sendirinya. *Wallahu a'lam.*